

Implementation of E-Government through "Lapor Klunting" to Reduce Stunting Rates at Integrated Health Posts (Posyandu) in Magersari Urban Village, Sidoarjo District, Sidoarjo Regency [Implementasi E-government melalui Lapor Klunting dalam Menurunkan Angka Stunting pada Posyandu di Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo]

Diah Ayu Budi Puspitarini¹⁾, Isnaini Rodiyah^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstract. *Stunting remains a major public health problem in Indonesia, requiring E-Government-based innovations to improve the effectiveness of child nutritional status monitoring. This study aims to analyze the implementation of E-Government through the Lapor Klunting application in supporting the early detection of child nutritional status at Posyandu in Magersari Village, Sidoarjo District, Sidoarjo Regency. This study employed a qualitative descriptive approach using George C. Edward III's policy implementation theory, which consists of four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that the implementation of the Lapor Klunting application has been carried out reasonably well. The communication dimension was supported by effective socialization, technical guidance, and coordination, although real-time reporting has not been fully implemented. The resources dimension was supported by healthcare personnel, Posyandu cadres, and information technology facilities; however, limitations remain in cadres' digital competencies and the availability of supporting facilities. The disposition dimension reflected the implementers' commitment and positive attitude toward the application, while the bureaucratic structure dimension was supported by clear Standard Operating Procedures (SOPs), task distribution, and coordination mechanisms. The implementation of Lapor Klunting has improved the speed, accuracy, and integration of child nutritional status reporting, thereby supporting the early detection of children at risk of malnutrition and stunting. This study recommends strengthening cadres' digital capacity, improving digital infrastructure, and optimizing real-time.*

Keywords – E-Government; Lapor Klunting; Policy Implementation; Posyandu; Stunting.

Abstrak. *Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia sehingga diperlukan inovasi berbasis E-Government untuk meningkatkan efektivitas pemantauan status gizi balita. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi E-Government melalui aplikasi Lapor Klunting dalam mendukung deteksi dini status gizi balita di Posyandu Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting telah berjalan cukup baik. Aspek komunikasi didukung oleh sosialisasi, bimbingan teknis, dan koordinasi yang efektif, meskipun pelaporan secara real time belum sepenuhnya terlaksana. Aspek sumber daya didukung oleh tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta sarana teknologi informasi, namun masih terdapat keterbatasan kompetensi digital kader dan pemerataan sarana pendukung. Aspek disposisi menunjukkan komitmen dan sikap positif pelaksana terhadap penggunaan aplikasi, sedangkan aspek struktur birokrasi didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP), pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi yang jelas. Implementasi Lapor Klunting mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan integrasi pelaporan status gizi balita sehingga mendukung deteksi dini balita berisiko gizi buruk dan stunting. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas digital kader, penguatan infrastruktur teknologi, serta optimalisasi pelaporan secara real time untuk meningkatkan efektivitas implementasi E-Government dalam mendukung percepatan penurunan stunting.*

Kata Kunci – E-Government; Lapor Klunting; Implementasi Kebijakan; Posyandu; Stunting.

I. PENDAHULUAN

Pemantauan pertumbuhan balita merupakan pelayanan dasar yang penting dalam upaya pencegahan stunting. Pelayanan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 sebagai bagian dari Standar

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Namun, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Anak-anak adalah aset masa depan sebuah negara. Sebagai penerus bangsa, kesejahteraan anak-anak harus menjadi fokus dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas [1]. Peran orang tua dan pengasuh sangat vital dalam menciptakan generasi anak yang sehat [2]. Pemenuhan gizi dan vaksinasi adalah langkah awal yang krusial dalam menciptakan kesehatan bagi anak-anak [3, 4]. Walaupun begitu, pemerintah tetap berkomitmen untuk memperbaiki kesehatan anak-anak. Dengan diadakannya peringatan Hari Anak Nasional, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang perlindungan anak di Indonesia agar mereka dapat berkembang menjadi generasi penerus yang optimal, termasuk dalam menyediakan dukungan gizi dan vaksinasi [5]. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi gizi sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak dilakukan melalui sosialisasi tentang pola hidup sehat dengan gizi seimbang yang juga mencakup pentingnya berolahraga secara teratur dan mendapatkan istirahat yang cukup terutama untuk anak-anak [6].

Pemerintah telah memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi ini menjadi landasan pelaksanaan program secara terintegrasi dengan mengamanatkan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting sesuai dengan kewenangan masing-masing. Implementasi kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi dan kebijakan di tingkat daerah, termasuk pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), penyusunan pedoman teknis, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, keberhasilan percepatan penurunan stunting tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan sinergi antarpemangku kepentingan di tingkat daerah.

Salah satu permasalahan yang dihadapi negara Indonesia adalah kekurangan gizi terutama masalah pendek (stunting) dan kurus (wasting) pada balita serta masalah anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil [7]. Masalah kekurangan gizi pada ibu hamil ini dapat menyebabkan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan kekurangan gizi pada balita termasuk stunting. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Permasalahan percepatan perbaikan gizi masyarakat diprioritaskan pada percepatan pencegahan stunting dengan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% dan wasting 7% di tahun 2024 [8]. Balita dengan masalah gizi dapat dilacak ketika balita mengakses fasilitas kesehatan. Selain itu, balita dengan masalah gizi dapat dideteksi lebih cepat melalui posyandu oleh kader dengan melaporkan hasil penimbangan dan pengukuran ke Puskesmas [9]. Berdasarkan hasil penilaian kinerja Puskesmas tahun 2021, terdapat 2 indikator kinerja program pelayanan gizi belum mencapai target yaitu tingkat partisipasi masyarakat (D/S) untuk balita yang ditimbang sebesar 66,6% dari target 70% (kesenjangan sebanyak 3,6%). Sedangkan tingkat keberhasilan program (N/D) sebesar 76,9% dari target 82% (kesenjangan 5,1%). Hal tersebut disebabkan antara lain hasil penimbangan di wilayah posyandu Magersari belum terekap semua, sarana antropometri di posyandu belum terstandar, pencatatan pelaporan dilakukan secara manual dan berjenjang sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama [10].

Percepatan perbaikan gizi Masyarakat diprioritaskan pada percepatan pencegahan stunting dengan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% dan wasting 7% di tahun 2024. Transformasi digital dalam pemerintahan bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Implementasi E-government dan kerangka kerja Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki peranan penting dalam transformasi layanan publik di Indonesia, termasuk dalam mengatasi isu kesehatan penting seperti percepatan penurunan angka stunting.

Di tingkat kabupaten ada Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo pemanfaatan inovasi digital tertentu, salah satunya lewat alat pelaporan seperti Aplikasi Lapor Klunting serta integrasinya dengan sistem nasional menjadi ujung tombak penanganan gizi buruk secara komprehensif. Salah satu wilayah administratif di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa/Kelurahan Magersari melakukan pengembangan aplikasi yang menunjang penurunan percepatan stunting dengan melihat status gizi secara *real time*. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah administrasi posyandu magersari dalam mengetahui kondisi status balita secara *real time*. Tujuan aplikasi ini adalah mengembangkan laporan posyandu di Era Digitalisasi menggunakan. Meningkatkan capaian partisipasi masyarakat (D/S) sehingga dapat menginterpretasikan status pertumbuhan balita (Naik/Tidak Naik). Mempercepat proses deteksi dini balita dengan masalah gizi (Underweight, Stunting, dan Wasting) untuk dilakukan intervensi oleh petugas. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemberian makan/diet anak berdasarkan kebutuhan gizi disesuaikan dengan masalah gizinya. Cara kerja aplikasi lapor klunting dimulai dari kader menginput hasil penimbangan dan pengukuran masing-masing posyandu di aplikasi spreadsheets hingga pelacakan dan intervensi balita stunting maupun masalah gizi lainnya melalui kegiatan kunjungan lapangan oleh petugas atau rujukan posyandu ke Puskesmas Sidoarjo [11], [12], [13].

Keunggulan aplikasi klunting Pencatatan dan pelaporan partisipasi masyarakat (D/S) untuk balita yang ditimbang dan balita yang ditimbang naik berat badannya (N/D) dilakukan oleh kader menggunakan aplikasi spreadsheet yang dapat digunakan baik di handphone maupun komputer. Pelaporan dilakukan secara langsung segera setelah kegiatan

posyandu dilaksanakan. Petugas kesehatan dapat langsung melakukan deteksi dini balita dengan masalah gizi (undereight, stunting dan wasting). Intervensi berupa kunjungan lapangan maupun rujukan posyandu ke Puskesmas Sidoarjo dapat segera dilakukan.

Tabel 1. Rekapitulasi balita di Posyandu Kelurahan Magersari

Tahun	Jumlah Balita	Gizi Buruk	Persentase
2022	588	35	5,95%
2023	1.098	49	4,46%
2024	818	7	0,86%

Sumber: Aplikasi Lapor Klunting, (Diolah Peneliti, 2026)

Berdasarkan Tabel 1, jumlah balita dengan gizi buruk di Kelurahan Magersari mengalami penurunan dari 35 balita (5,95%) pada tahun 2022 menjadi 7 balita (0,86%) pada tahun 2024. Meskipun demikian, data tersebut masih menunjukkan adanya balita yang mengalami gizi buruk sehingga upaya pencegahan dan penanganan belum sepenuhnya optimal. Terdapat dua permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini. Pertama, masih ditemukannya kasus gizi buruk menunjukkan bahwa program pencegahan dan penanganan gizi belum mampu menghilangkan kasus secara menyeluruh. Kedua, proses pemantauan pertumbuhan balita dan pelaporan hasil penimbangan di Posyandu belum sepenuhnya dilakukan secara cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga berpotensi menghambat deteksi dini balita berisiko gizi buruk. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan implementasi sistem pelaporan berbasis digital melalui aplikasi Lapor Klunting guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam upaya penurunan gizi buruk di Kelurahan Magersari.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program pencegahan dan penurunan stunting sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, koordinasi lintas sektor, kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat. Penelitian Yani et al. (2023) menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat melalui sosialisasi yang efektif merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi program pencegahan stunting. Nusantara et al. (2023) menemukan bahwa penguatan komunikasi dua arah, peningkatan kapasitas kader Posyandu, dan sinergi antarinstansi menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas program pencegahan stunting. Selanjutnya, Putri et al. (2023) menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting didukung oleh struktur birokrasi yang baik, koordinasi kelembagaan, serta komunikasi kebijakan yang konsisten. Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa komitmen pemerintah, integrasi lintas sektor, pemanfaatan data, serta pemberdayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam percepatan penurunan stunting (WHO, 2023; UNICEF, 2023; Kementerian Kesehatan RI, 2023). Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada implementasi program pencegahan stunting di tingkat kelurahan dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan publik untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program di lokasi penelitian.

Pada Kelurahan Magersari menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kondisi implementasi program pencegahan stunting dengan kondisi ideal sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Dari aspek komunikasi, pelaporan hasil penimbangan balita dari Posyandu ke Puskesmas masih dilakukan secara manual sehingga informasi mengenai balita berisiko stunting tidak dapat diterima secara cepat. Dari aspek sumber daya manusia, kemampuan kader Posyandu dalam melakukan deteksi dini dan pelaporan masih belum optimal sehingga memerlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan. Sementara itu, dari aspek sarana dan prasarana, masih ditemukan keterbatasan alat antropometri yang belum terstandar serta sistem pencatatan dan pelaporan yang belum terdigitalisasi, sehingga proses rekapitulasi data berlangsung lambat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi program stunting ditentukan oleh komunikasi yang efektif, sumber daya manusia yang kompeten, serta sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi program pencegahan stunting di Kelurahan Magersari berdasarkan indikator implementasi kebijakan George C. Edward III.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai implementasi E-Government melalui aplikasi Lapor Klunting dalam mendukung program pencegahan dan penurunan stunting di Posyandu. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi E-Government melalui Lapor Klunting dalam penanganan stunting di Posyandu Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo..

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan memahami secara mendalam proses implementasi E-Government melalui aplikasi Lapor Klunting berbasis Google Spreadsheet dalam mendukung deteksi dini status gizi balita, sehingga mampu menggambarkan kondisi empiris, interaksi antaraktor, serta berbagai faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian dilaksanakan di Posyandu Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, karena wilayah ini merupakan lokasi penerapan inovasi Lapor Klunting dan masih ditemukan permasalahan dalam pemantauan status gizi balita sehingga relevan untuk dikaji. Fokus penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai indikator untuk menganalisis implementasi aplikasi Lapor Klunting. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan serta data sekunder yang berasal dari Profil Gizi Puskesmas Sidoarjo, laporan Posyandu, Standar Operasional Prosedur (SOP) Lapor Klunting, peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya [14]. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi program. Informan penelitian terdiri atas dr. Erwin Berthaningrum selaku Kepala Puskesmas Sidoarjo, Rani Juwita Rahmawati selaku Koordinator Gizi sekaligus Penanggung Jawab Inovasi Lapor Klunting, Endah Mumpuni selaku Nutrisionis/Petugas Gizi Puskesmas, Sila selaku Koordinator Kader Posyandu, dan Merie selaku Kader Posyandu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk mengamati proses penimbangan balita, penggunaan aplikasi, dan pelaporan data di Posyandu, wawancara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai implementasi program berdasarkan pengalaman informan, serta dokumentasi untuk melengkapi data melalui laporan program, data status gizi, foto kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi pengumpulan data (data collection) untuk menghimpun seluruh informasi penelitian, kondensasi data (data condensation) melalui proses seleksi, penyederhanaan, pengelompokan, dan pemfokusan data sesuai indikator penelitian, penyajian data (data display) dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan kutipan wawancara agar memudahkan interpretasi, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification) yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan konsistensi temuan dengan data empiris dan menjawab tujuan penelitian [15].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi E-Government melalui Lapor Klunting dalam menurunkan Angka Stunting pada Posyandu di Kelurahan Magersari. Penelitian ini dalam menganalisis menggunakan teori Implementasi kebijakan George Edward pendekatan yang digunakan ada 4 (empat) variabel yaitu :

A. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi cara kebijakan publik dijalankan, komunikasi sangat menentukan apakah tujuan dari kebijakan publik tersebut dapat dicapai dengan baik atau tidak. Menurut George C. Edward III (1980), komunikasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan bagaimana informasi, tujuan, serta prosedur kebijakan disampaikan kepada para pelaksana. Komunikasi yang efektif akan menciptakan kesamaan pemahaman di antara implementor sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut George C. Edward III (1980), transmisi merupakan proses penyampaian informasi, instruksi, dan kebijakan dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana. Transmisi yang efektif ditandai dengan tersampainya informasi secara tepat, lengkap, dan berjenjang sehingga seluruh pelaksana memahami tugas serta prosedur pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, penyampaian informasi yang kurang efektif dapat menimbulkan kesalahan pemahaman dan menghambat implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai implementasi aplikasi Lapor Klunting dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo kepada Puskesmas Sidoarjo, kemudian diteruskan kepada badan penanggung jawab wilayah dan kader Posyandu melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendampingan penggunaan aplikasi.

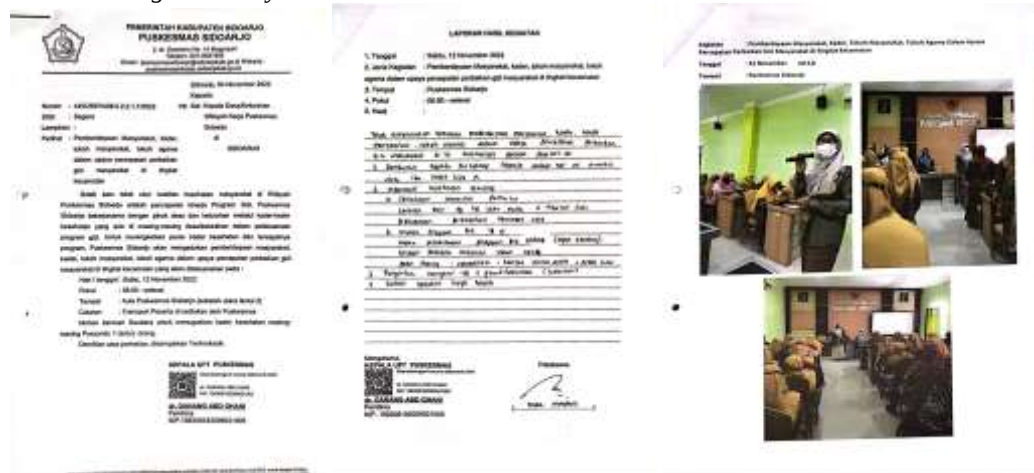
Hal tersebut disampaikan oleh Rani Juwita Rahmawati, A.Md.Gz selaku Koordinator Gizi sekaligus Penanggung Jawab Inovasi Lapor Klunting Puskesmas Sidoarjo, sebagai berikut:

"Sebelum aplikasi Lapor Klunting digunakan, seluruh kader Posyandu diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai tata cara penggunaan aplikasi. Informasi disampaikan secara berjenjang"

mulai dari Dinas Kesehatan, kemudian diteruskan oleh Puskesmas kepada kader agar pelaporan dapat dilakukan secara digital."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Merie selaku Kader Posyandu Kelurahan Magersari, yang menyampaikan:

"Kami mengikuti sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi. Setelah mendapatkan penjelasan, kami mulai menginput hasil penimbangan balita ke aplikasi Lapor Klunting setiap selesai kegiatan Posyandu."



Gambar 1. Sosialisasi Lapor Klunting
Sumber: Data Primer, 2026

Gambar 1 menggambarkan kegiatan Puskesmas Sidoarjo sebagai upaya memberikan pemahaman kepada kader Posyandu mengenai prosedur penggunaan aplikasi, mekanisme pelaporan digital, serta tata cara penginputan data hasil penimbangan balita. Melalui kegiatan tersebut, kader memperoleh pendampingan secara langsung sehingga memiliki pemahaman yang sama mengenai proses pelaporan menggunakan aplikasi Lapor Klunting. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa setelah mengikuti sosialisasi, kader Posyandu telah mampu melakukan penginputan data hasil penimbangan balita ke dalam aplikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, Profil Gizi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 menjelaskan bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting merupakan bagian dari inovasi digital dalam sistem pelaporan gizi yang bertujuan meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan akurasi data status gizi balita. Hadirnya sosialisasi, kader Posyandu telah mampu melakukan penginputan data hasil penimbangan balita ke dalam aplikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, Profil Gizi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 menjelaskan bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting merupakan bagian dari inovasi digital dalam sistem pelaporan gizi yang bertujuan meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan akurasi data status gizi balita.

Implementasi aplikasi Lapor Klunting telah berlangsung melalui mekanisme komunikasi yang terstruktur dan berjenjang. Sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendampingan yang dilakukan oleh Puskesmas mampu meningkatkan pemahaman kader mengenai penggunaan aplikasi sehingga proses pelaporan digital dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Meskipun demikian, pada beberapa Posyandu masih ditemukan kebiasaan melakukan pencatatan secara manual sebelum data diinput ke dalam aplikasi sehingga penyampaian informasi belum sepenuhnya berlangsung secara real time.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yani et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi program pencegahan stunting sangat dipengaruhi oleh komunikasi dan sosialisasi yang efektif antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan masyarakat. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Nusantara et al. (2023) yang menyatakan bahwa penguatan komunikasi dua arah serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi program pencegahan stunting. Selain itu, Putri dan Suprayoga (2023) menjelaskan bahwa kejelasan transmisi informasi, koordinasi kelembagaan, dan komunikasi kebijakan yang konsisten menjadi unsur utama keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting di tingkat kecamatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa komunikasi yang ditransmisikan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan koordinasi berjenjang merupakan prasyarat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi transmisi dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting telah berjalan dengan baik melalui penyampaian informasi secara berjenjang, kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada kader Posyandu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun telah mampu mendukung implementasi kebijakan sesuai dengan konsep George C. Edward III, meskipun

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

masing Posyandu bertujuan mempermudah proses pencatatan, meminimalkan kesalahan pengisian data, serta mempercepat proses verifikasi oleh petugas gizi Puskesmas.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Suprayoga (2023) yang menyatakan bahwa kejelasan komunikasi kebijakan merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi program penurunan stunting. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Yani et al. (2023) yang menjelaskan bahwa sosialisasi dan penyampaian prosedur yang jelas mampu meningkatkan pemahaman pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi kejelasan (clarity) dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting telah terpenuhi dengan baik karena didukung oleh adanya petunjuk teknis tertulis, sosialisasi, serta pemahaman yang sama di antara para pelaksana mengenai tujuan dan mekanisme penggunaan aplikasi. Namun demikian, peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan yang berkelanjutan tetap diperlukan agar kemampuan penggunaan aplikasi semakin merata dan implementasi kebijakan dapat berlangsung secara lebih optimal.

Konsistensi

Menurut George C. Edward III (1980), konsistensi merupakan kesesuaian penyampaian informasi dan pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan sehingga instruksi yang diterima oleh pelaksana tidak berubah-ubah. Konsistensi diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara stabil, terarah, dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap selesai kegiatan Posyandu, kader secara rutin menerima informasi melalui grup WhatsApp sebagai acuan untuk melakukan penginputan data hasil penimbangan ke dalam aplikasi Lapor Klunting. Pola komunikasi yang dilakukan secara berulang dan menggunakan media yang sama memudahkan koordinasi antara kader Posyandu, bidan penanggung jawab wilayah, petugas gizi Puskesmas, hingga Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama dr. Erwin Berthaningrum selaku Kepala Puskesmas Sidoarjo, yang menyatakan:

"Pengumpulan data melalui aplikasi Lapor Klunting memungkinkan petugas mengetahui status gizi balita secara dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Namun demikian, cakupan balita yang datang ke Posyandu masih perlu ditingkatkan melalui dukungan lintas sektor, serta setiap Posyandu harus didukung dengan alat antropometri yang memadai agar data yang dihasilkan tetap akurat."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Puskesmas Sidoarjo berkomitmen menjaga konsistensi implementasi aplikasi Lapor Klunting melalui pelaksanaan pelaporan secara rutin setiap bulan, mekanisme verifikasi data yang berjenjang, serta koordinasi yang berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil observasi, data hasil penimbangan balita secara berkala diverifikasi oleh petugas gizi Puskesmas sebelum diteruskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sebagai dasar pemantauan status gizi balita dan pelaksanaan intervensi dini terhadap balita yang berisiko mengalami stunting. Komunikasi antara Puskesmas Sidoarjo, Pemerintah Kelurahan Magersari, bidan penanggung jawab wilayah, dan kader Posyandu telah berlangsung secara konsisten melalui koordinasi rutin, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pemanfaatan grup WhatsApp sebagai media penyampaian informasi. Meskipun demikian, penelitian masih menemukan beberapa kendala pada tahap implementasi, yaitu sebagian kader masih melakukan pencatatan hasil penimbangan secara manual sebelum menginput data ke dalam aplikasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelaporan belum sepenuhnya berlangsung secara real time, sehingga penyampaian informasi mengenai balita berisiko stunting dan tindak lanjut intervensinya memerlukan waktu yang lebih lama.

Gambar 3 memperlihatkan grup WhatsApp "Tutorial Form Penimbangan" yang digunakan oleh Puskesmas Sidoarjo sebagai media komunikasi untuk mendistribusikan tautan Google Form Lapor Klunting kepada seluruh kelurahan di wilayah kerjanya, termasuk Kelurahan Magersari. Melalui grup tersebut, setiap kader Posyandu memperoleh tautan pelaporan yang sama pada setiap periode pelaksanaan Posyandu. Penggunaan media komunikasi yang tetap dan berkelanjutan menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian informasi, instruksi, serta akses terhadap sistem pelaporan dilakukan secara konsisten sehingga seluruh pelaksana menggunakan prosedur yang seragam dalam pelaporan status gizi balita.



Gambar 3. Grup WhatsApp "Tutorial Form Penimbangan" sebagai Media Penyampaian Tautan Google Form Lapor Klunting
Sumber: Data Primer, 2026

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nusantara et al. (2023) yang menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan faktor penting dalam menjaga efektivitas implementasi program pencegahan stunting. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Putri dan Suprayoga (2023) yang menjelaskan bahwa konsistensi komunikasi, koordinasi kelembagaan, serta mekanisme pelaporan yang dilakukan secara terus-menerus menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi konsistensi dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting di Kelurahan Magersari telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya mekanisme komunikasi yang berkelanjutan melalui grup WhatsApp, pelaporan rutin setiap bulan, proses verifikasi data secara berjenjang, serta koordinasi yang terus dilakukan antara kader Posyandu, Puskesmas Sidoarjo, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Namun demikian, optimalisasi penggunaan aplikasi secara langsung pada saat kegiatan Posyandu, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penyediaan sarana pendukung masih diperlukan agar implementasi aplikasi Lapor Klunting dapat berlangsung secara lebih konsisten, efektif, dan sesuai dengan konsep George C. Edward III mengenai pentingnya konsistensi dalam implementasi kebijakan publik.

B. Sumber Daya (*resource*)

Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut George C. Edward III (1980), sumber daya merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tidak hanya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, tetapi juga kompetensi, kewenangan, fasilitas, serta dukungan yang diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan akan sulit mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Rani Juwita Rahmawati, A.Md.Gz selaku Koordinator Gizi sekaligus Penanggung Jawab Inovasi Lapor Klunting Puskesmas Sidoarjo, yang menyampaikan:

"Kader Posyandu sebelum menggunakan aplikasi Lapor Klunting diberikan sosialisasi dan pendampingan terlebih dahulu. Mereka dilatih cara menginput data hasil penimbangan sehingga dapat mengetahui status gizi balita dengan lebih cepat."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sila selaku Koordinator Kader Posyandu Kelurahan Magersari, yang menjelaskan:

"Setiap Posyandu memiliki kader administrasi yang bertugas memasukkan hasil penimbangan ke aplikasi. Kalau ada kader yang mengalami kesulitan, kami dampingi sampai bisa mengoperasikan aplikasi."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi Lapor Klunting tidak hanya ditentukan oleh jumlah kader yang tersedia, tetapi juga oleh kompetensi yang dibangun melalui sosialisasi, pelatihan,

dan pendampingan secara berkelanjutan. Pembagian tugas antara kader pelayanan, kader administrasi, bidan wilayah, serta petugas gizi Puskesmas menciptakan mekanisme kerja yang jelas sehingga proses pencatatan, verifikasi, dan pelaporan data dapat berjalan secara sistematis. Pelaksanaan kegiatan Posyandu. Berdasarkan observasi, kader telah melaksanakan tugas sesuai pembagian perannya masing-masing, mulai dari melakukan penimbangan dan pengukuran antropometri, mencatat hasil pemeriksaan, hingga menginput data ke dalam aplikasi Lapor Klunting. Apabila terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi, kader memperoleh pendampingan dari koordinator kader maupun petugas gizi Puskesmas sehingga proses pelaporan tetap dapat diselesaikan sesuai prosedur.

Dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting, sumber daya manusia terdiri atas Kepala Puskesmas, Koordinator Gizi, nutrisionis, bidan penanggung jawab wilayah, koordinator kader, serta kader Posyandu sebagai pelaksana utama di lapangan. Berdasarkan data Puskesmas Sidoarjo, Kelurahan Magersari memiliki 12 Posyandu dengan jumlah 85 kader Posyandu, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Posyandu dan Jumlah Kader Posyandu

NO	POSYANDU KELURAHAN MAGERSARI	JUMLAH KADER
1	POSYANDU 1	7 KADER
2	POSYANDU 2	8 KADER
3	POSYANDU 3	7 KADER
4	POSYANDU 4	9 KADER
5	POSYANDU 5	8 KADER
6	POSYANDU 6	7 KADER
7	POSYANDU 7	7 KADER
8	POSYANDU 8	5 KADER
9	POSYANDU 9	7 KADER
10	POSYANDU 10	6 KADER
11	POSYANDU 11	7 KADER
12	POSYANDU 12	7 KADER

Sumber data : Data Kader wilayah Puskesmas Sidoarjo, (Diolah peneliti, 2026)

Berdasarkan Tabel 2, jumlah kader pada setiap Posyandu berkisar antara 5 hingga 9 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitas ketersediaan sumber daya manusia telah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pelayanan Posyandu, mulai dari penimbangan balita, pengukuran antropometri, pemberian vitamin, imunisasi, pemberian makanan tambahan (PMT), hingga pelaporan hasil pemeriksaan melalui aplikasi Lapor Klunting. Selain menjalankan pelayanan kesehatan, setiap Posyandu juga menugaskan seorang kader sebagai administrator yang bertanggung jawab melakukan penginputan data ke dalam aplikasi berbasis Google Spreadsheet.

Gambar 4 menunjukkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sidoarjo Nomor 440/92/438.5.2.2.1.1/2023 tentang Tim Inovasi Lapor Klunting. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting didukung oleh pembentukan tim pelaksana yang memiliki struktur organisasi, kewenangan, serta pembagian tugas yang jelas. Tim tersebut terdiri atas Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab, Koordinator Gizi sebagai koordinator program, nutrisionis, bidan penanggung jawab wilayah, serta tenaga kesehatan lainnya yang bertugas melakukan pembinaan kader, pendampingan teknis, verifikasi data, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan aplikasi. Aplikasi Lapor Klunting telah didukung oleh sumber daya manusia yang tidak hanya memadai dari sisi jumlah, tetapi juga memiliki legitimasi kelembagaan melalui pembentukan tim resmi. Dengan adanya Surat Keputusan tersebut, setiap pelaksana memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sehingga koordinasi dalam pelaksanaan program dapat berlangsung secara lebih efektif.



Gambar 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sidoarjo tentang Tim Inovasi Lapor Klunting
Sumber: Data Primer, 2026

Sumber daya manusia dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting telah terpenuhi dengan baik. Ketersediaan kader Posyandu, adanya pembagian tugas yang jelas, pelatihan penggunaan aplikasi, serta dukungan kelembagaan melalui pembentukan Tim Inovasi Lapor Klunting menjadi faktor yang mendukung keberhasilan implementasi program. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan digital secara berkala masih diperlukan agar seluruh pelaksana memiliki kompetensi yang merata dalam mengoperasikan aplikasi dan mampu mengikuti perkembangan sistem informasi kesehatan berbasis digital.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nusantara et al. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi program pencegahan stunting dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan koordinasi antarpelaksana. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Putri dan Suprayoga (2023) yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, pembagian tugas yang jelas, serta dukungan organisasi yang memadai. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat teori George C. Edward III (1980) bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kewenangan yang jelas, dan didukung oleh struktur organisasi yang baik merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Sarana dan Prasarana

Menurut George C. Edward III (1980), ketersediaan sarana dan prasarana merupakan bagian dari sumber daya yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sarana yang memadai akan mendukung pelaksanaan tugas implementor sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting di Kelurahan Magersari didukung oleh berbagai sarana dan prasarana, antara lain telepon pintar (smartphone), komputer atau laptop, jaringan internet, aplikasi Google Spreadsheet, serta alat antropometri yang digunakan untuk mengukur status gizi balita. Ketersediaan fasilitas tersebut memungkinkan kader Posyandu menginput hasil penimbangan secara langsung setelah kegiatan Posyandu selesai sehingga data dapat segera diterima oleh petugas gizi Puskesmas untuk diverifikasi dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam sistem pelaporan e-PPGBM. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Rani Juwita Rahmawati, A.Md.Gz selaku Koordinator Gizi sekaligus Penanggung Jawab Inovasi Lapor Klunting Puskesmas Sidoarjo, yang menyatakan:

"Aplikasi dibuat supaya laporan tidak lagi terlambat. Setelah Posyandu selesai, kader langsung mengisi laporan sehingga data bisa diterima saat itu juga. Dengan demikian, jumlah balita yang mengalami gizi buruk maupun stunting dapat diketahui lebih cepat tanpa harus menunggu rekapitulasi manual."

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan dr. Erwin Berthaningrum selaku Kepala Puskesmas Sidoarjo, yang menjelaskan:

"Pengumpulan data melalui aplikasi Lapor Klunting memungkinkan status gizi balita diketahui lebih dini sehingga penanganannya juga dapat dilakukan lebih cepat. Data yang masuk menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap balita yang mengalami stunting maupun masalah gizi lainnya."

Keberhasilan implementasi aplikasi Lapor Klunting tidak hanya didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, tetapi juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Smartphone, komputer atau laptop, jaringan internet, Google Spreadsheet, serta alat antropometri menjadi komponen penting yang mendukung kelancaran proses pelaporan digital. Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan masih terdapat beberapa kendala, seperti kualitas jaringan internet yang belum stabil di beberapa lokasi Posyandu dan ketersediaan alat antropometri yang belum sepenuhnya terstandarisasi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kecepatan pelaporan maupun akurasi hasil pengukuran status gizi balita.

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Tinggi Badan		Berat Badan		Status Gizi	Status Stunting	Status Wasting	Status Overweight	Status Obese	Status Gizi Buruk
				cm	kg	cm	kg						
1	PERMATA	PERMATA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	PERMATA	PERMATA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	PERMATA	PERMATA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	PERMATA	PERMATA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	PERMATA	PERMATA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	PERMATA	PERMATA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	PERMATA	PERMATA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PERMATA	PERMATA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Gambar 5. Aplikasi Google Spreadsheet Lapor Klunting kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo
Sumber: Data Primer, 2026

Gambar 5 menunjukkan tampilan Google Spreadsheet Lapor Klunting yang digunakan sebagai media pelaporan digital hasil penimbangan balita di Posyandu Kelurahan Magersari. Berdasarkan hasil observasi, setiap Posyandu memiliki kader administrasi yang bertanggung jawab menginput data hasil pengukuran balita secara langsung ke dalam aplikasi setelah kegiatan pelayanan selesai. Data tersebut kemudian dipantau oleh koordinator kader, diverifikasi oleh petugas gizi Puskesmas, dan menjadi dasar pelaksanaan tindak lanjut terhadap balita yang terindikasi mengalami stunting maupun masalah gizi lainnya. Dokumentasi aplikasi tersebut memperlihatkan bahwa seluruh proses pelaporan telah memanfaatkan perangkat digital yang terhubung dengan jaringan internet sehingga penyampaian data dari Posyandu ke Puskesmas dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan dengan sistem pelaporan manual. Selain mempercepat proses rekapitulasi data, penggunaan Google Spreadsheet juga memudahkan petugas gizi dalam melakukan pemantauan perkembangan status gizi balita secara real time, sehingga keputusan mengenai intervensi dapat dilakukan lebih cepat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Nusantara et al. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi program pencegahan stunting dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan teknologi informasi dalam proses pelaporan. Hasil penelitian ini juga mendukung Putri dan Suprayoga (2023) yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting memerlukan dukungan fasilitas yang memadai dan sistem informasi yang mampu menghasilkan data secara cepat dan akurat. Selain itu, WHO (2023) dan UNICEF (2023) menegaskan bahwa penguatan infrastruktur digital, ketersediaan perangkat pendukung, serta akses internet yang memadai merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pemantauan status gizi balita dan percepatan penanganan stunting.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator sarana dan prasarana dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting di Kelurahan Magersari telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh tersedianya perangkat digital, jaringan internet, aplikasi Google Spreadsheet, dan alat antropometri yang mendukung proses pelaporan status gizi balita secara lebih cepat dan akurat. Meskipun demikian, peningkatan kualitas jaringan internet, pemerataan ketersediaan alat antropometri yang terstandar, serta pemeliharaan sarana pendukung masih diperlukan agar implementasi aplikasi Lapor Klunting dapat berlangsung secara lebih optimal dan berkelanjutan sesuai dengan konsep sumber daya (resources) yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980).

C. Sikap (*disposition or attitudes*)

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Respons Pelaksana

Menurut George C. Edward III (1980), disposisi atau respons pelaksana merupakan kecenderungan implementor untuk menerima, mendukung, dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap tersebut tercermin melalui komitmen, tanggung jawab, kejujuran, serta kesediaan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin positif sikap pelaksana terhadap suatu kebijakan, semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sila selaku Koordinator Kader Posyandu Kelurahan Magersari, yang menyampaikan:

"Kami lebih senang menggunakan aplikasi Lapor Klunting karena lebih cepat dan lebih akurat untuk mengetahui status gizi balita di Kelurahan Magersari. Aplikasinya lebih sederhana, tetapi memang masih ada beberapa kendala, misalnya tanggal harus dihapus terlebih dahulu, rekapitulasi belum sepenuhnya maksimal, dan data balita yang sudah tidak aktif masih muncul sehingga kami harus lebih teliti saat menginput data. Namun aplikasi ini sangat membantu karena ketika ada permintaan data, misalnya untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami dapat langsung mengetahui jumlah balita yang menerima berdasarkan nama masing-masing."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para kader memberikan respons yang positif terhadap implementasi aplikasi Lapor Klunting. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis pada sistem, seperti pembaruan data yang belum otomatis dan proses input yang masih memerlukan ketelitian, kondisi tersebut tidak mengurangi kesediaan kader untuk tetap memanfaatkan aplikasi dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu. Sebaliknya, para kader menilai bahwa aplikasi mampu mempercepat pelaporan, memudahkan pencarian data balita, serta mendukung proses pengambilan keputusan dalam berbagai program kesehatan. Para kader Posyandu secara konsisten melaksanakan penimbangan, pengukuran antropometri, pencatatan hasil pemeriksaan, serta penginputan data ke dalam aplikasi Lapor Klunting sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Selain menjalankan tugas administrasi, kader juga tetap memberikan edukasi kepada orang tua balita serta berkoordinasi dengan bidan penanggung jawab wilayah apabila ditemukan balita yang berisiko mengalami stunting. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen pelaksana dalam menjalankan tugas meskipun implementasi aplikasi masih menghadapi beberapa kendala teknis.



Gambar 6. Laporan Inovasi Daerah Lapor Klunting Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Data Primer, 2026

Gambar 6 menunjukkan Laporan Inovasi Daerah Lapor Klunting Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menetapkan aplikasi Lapor Klunting sebagai salah satu inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa aplikasi Lapor Klunting memperoleh dukungan kelembagaan sebagai inovasi yang dikembangkan untuk mempercepat pelaporan hasil penimbangan balita dan mendukung deteksi dini stunting. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi aplikasi tidak hanya diterima pada tingkat organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Respons pelaksana terhadap implementasi aplikasi Lapor Klunting tergolong sangat baik. Pengakuan Lapor Klunting sebagai inovasi daerah, didukung oleh sikap positif kader dalam menerima penggunaan teknologi digital, menunjukkan adanya kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan komitmen pelaksana di lapangan. Kendala yang ditemukan lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis aplikasi sehingga tidak memengaruhi kemauan maupun tanggung jawab kader dalam melaksanakan pelaporan status gizi balita. Temuan penelitian ini sejalan dengan Yani et al. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi program pencegahan stunting dipengaruhi oleh komitmen dan partisipasi aktif tenaga kesehatan serta kader

Posyandu. Penelitian Nusantara et al. (2023) juga menjelaskan bahwa sikap positif pelaksana terhadap inovasi pelayanan publik menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi program. Sementara itu, Putri dan Suprayoga (2023) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komitmen implementor dalam menjalankan tugas sesuai prosedur dan kesediaannya untuk mendukung kebijakan pemerintah secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator respons pelaksana dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting telah terpenuhi dengan baik. Para kader Posyandu menunjukkan sikap menerima, mendukung, dan berkomitmen dalam memanfaatkan aplikasi sebagai media pelaporan digital. Dukungan tersebut diperkuat oleh pengakuan Lapor Klunting sebagai inovasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis pada aplikasi, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen pelaksana dalam menjalankan tugasnya.

Insentif

Menurut George C. Edward III (1980), pemberian insentif merupakan salah satu strategi untuk menjaga motivasi dan komitmen implementor dalam melaksanakan kebijakan. Insentif tidak hanya berbentuk penghargaan finansial, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap beban kerja dan tanggung jawab yang diemban oleh pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader Posyandu di Kelurahan Magersari menerima honorarium sebesar Rp100.000 per bulan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Posyandu, meliputi pelayanan kesehatan ibu dan balita, penimbangan dan pengukuran antropometri, penyuluhan kesehatan, pencatatan administrasi, hingga penginputan data ke dalam aplikasi Lapor Klunting. Seiring dengan diterapkannya sistem pelaporan digital, beban kerja kader juga meningkat karena mereka dituntut memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi serta memastikan ketepatan dan kelengkapan data yang diinput. Temuan tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan Ibu Merie selaku Kader Posyandu 10 Kelurahan Magersari, yang menyampaikan:

"Honor yang kami terima memang tidak besar, tetapi kami tetap menjalankan tugas karena ingin membantu masyarakat. Pengisian aplikasi membutuhkan waktu dan ketelitian, namun kami tetap berusaha agar data yang masuk benar sehingga balita yang membutuhkan penanganan bisa segera diketahui."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa insentif finansial yang diterima kader belum sepenuhnya sebanding dengan tanggung jawab yang harus dijalankan, terutama setelah adanya digitalisasi pelaporan melalui aplikasi Lapor Klunting. Meskipun demikian, keterbatasan insentif tidak mengurangi komitmen kader dalam melaksanakan pelayanan Posyandu maupun penginputan data secara rutin. Terdapat motivasi pelaksana implementasi aplikasi Lapor Klunting lebih banyak dipengaruhi oleh komitmen sosial, rasa tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kesehatan balita daripada faktor ekonomi semata. Namun demikian, peningkatan insentif maupun bentuk penghargaan nonfinansial, seperti pelatihan, sertifikat penghargaan, pemberian apresiasi kepada kader berprestasi, serta pengembangan kapasitas secara berkelanjutan, tetap diperlukan untuk mempertahankan motivasi dan meningkatkan kualitas implementasi program. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nusantara et al. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi program pencegahan stunting tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi kader, tetapi juga oleh dukungan organisasi dan motivasi kerja pelaksana. Penelitian Yani et al. (2023) juga menjelaskan bahwa komitmen kader merupakan faktor utama keberhasilan program, sedangkan pemberian penghargaan yang memadai mampu meningkatkan semangat serta keberlanjutan pelaksanaan program. Selain itu, WHO (2023) menegaskan bahwa tenaga kesehatan dan kader masyarakat memerlukan dukungan organisasi, penghargaan, dan motivasi yang memadai agar kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator insentif dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting belum sepenuhnya optimal. Walaupun honorarium yang diterima kader masih relatif terbatas dibandingkan dengan meningkatnya beban kerja akibat digitalisasi pelaporan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen mereka dalam menjalankan tugas.

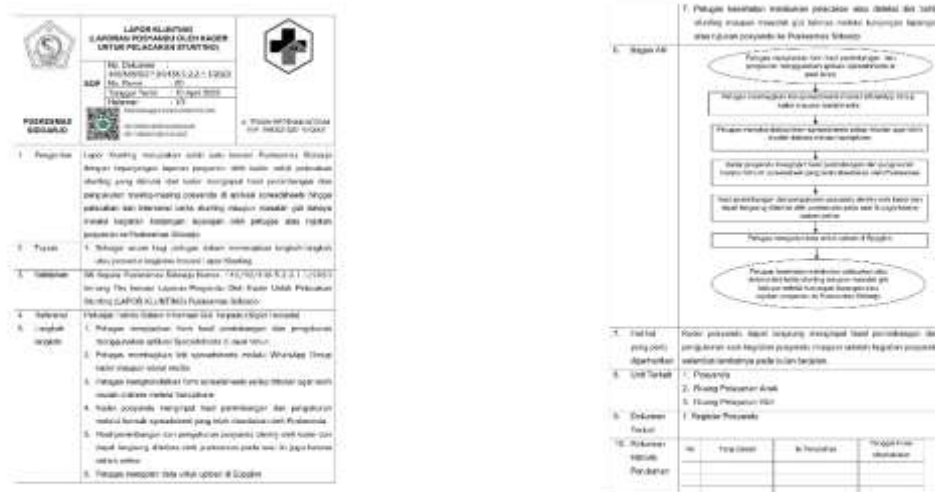
D. Struktur Birokrasi (bireucratic structure) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut George C. Edward III (1980), struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Salah satu unsur penting dalam struktur birokrasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi seluruh pelaksana kebijakan. SOP yang jelas, sistematis, dan dipahami oleh setiap pelaksana akan meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan, memperkuat koordinasi antarunit kerja, serta menjamin keseragaman prosedur pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting di Puskesmas Sidoarjo telah didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) Lapor Klunting Tahun 2023 yang mengatur alur pelaporan status gizi balita secara digital. Berdasarkan SOP tersebut, proses pelaporan dimulai dari kader Posyandu yang melakukan penimbangan

dan pengukuran antropometri balita setiap bulan, kemudian hasil pengukuran diinput ke dalam aplikasi Lapor Klunting. Selanjutnya data diverifikasi oleh petugas gizi dan bidan penanggung jawab wilayah di Puskesmas sebelum diteruskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sebagai dasar pemantauan status gizi, penyusunan program, serta evaluasi penanganan stunting. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Endah Mumpuni, A.Md.Gz selaku Nutrisionis/Petugas Gizi Puskesmas Sidoarjo, yang menjelaskan:

"Alur pelaporan melalui Lapor Klunting dimulai dari kader Posyandu yang melakukan penimbangan dan pengukuran balita setiap bulan. Data tersebut kemudian diinput ke aplikasi, diverifikasi oleh petugas gizi Puskesmas, dan selanjutnya diteruskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sebagai dasar penyusunan program dan evaluasi penanganan stunting."

Hasil wawancara tersebut kemudian ditriangulasikan dengan dokumen SOP Lapor Klunting Tahun 2023 sebagai data sekunder. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan pelaporan telah diatur secara sistematis, mulai dari proses pengukuran balita, penginputan data ke aplikasi, mekanisme verifikasi oleh petugas gizi Puskesmas, hingga penyampaian data kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. SOP juga mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana, sehingga setiap aktor memiliki kewenangan yang jelas sesuai fungsi dan perannya dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting. Adanya kesesuaian antara prosedur yang tertulis dengan praktik pelaksanaan di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman operasional yang ditetapkan. Kejelasan alur kerja tersebut mendukung terciptanya koordinasi yang lebih efektif, meminimalkan kesalahan administrasi, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam upaya percepatan penurunan stunting.



Gambar 7. SOP Lapor Klunting

Sumber: Data Primer, 2026

Gambar 7 menjelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Lapor Klunting Tahun 2023 yang menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting telah memiliki prosedur operasional yang jelas dan terstruktur. SOP tersebut mengatur tahapan pelaksanaan mulai dari kegiatan penimbangan dan pengukuran antropometri balita di Posyandu, pencatatan hasil pemeriksaan, penginputan data ke dalam aplikasi Lapor Klunting berbasis Google Spreadsheet oleh kader Posyandu, proses verifikasi data oleh petugas gizi dan bidan penanggung jawab wilayah di Puskesmas, hingga pelaporan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sebagai dasar pemantauan status gizi balita dan pengambilan keputusan program percepatan penurunan stunting. Keberadaan SOP tersebut menunjukkan bahwa implementasi Lapor Klunting telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme kerja yang baku, pembagian tugas yang jelas, serta alur koordinasi yang sistematis antar pelaksana, sehingga mampu mendukung ketepatan, akurasi, dan konsistensi pelaporan status gizi balita. Dengan demikian, hasil observasi dan wawancara yang menunjukkan adanya pelaporan digital secara berjenjang selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam SOP Lapor Klunting Tahun 2023, sehingga memperkuat bahwa struktur birokrasi dalam implementasi aplikasi telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Suprayoga (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting dipengaruhi oleh kejelasan prosedur kerja dan koordinasi birokrasi yang baik. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Yani et al. (2023) yang menjelaskan bahwa keberadaan SOP yang jelas mampu meningkatkan koordinasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan kader Posyandu sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung secara lebih efektif dan terstandar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya pedoman operasional yang terdokumentasi, pembagian tugas yang jelas, mekanisme pelaporan dan verifikasi data yang sistematis, serta kesesuaian antara prosedur tertulis dengan pelaksanaan di lapangan. Temuan tersebut memperkuat teori George C. Edward III (1980) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi yang didukung oleh SOP yang jelas merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan karena mampu menciptakan keseragaman prosedur, meningkatkan koordinasi, dan menjamin efektivitas pelaksanaan program.

Fragmentasi

Menurut George C. Edward III (1980), fragmentasi merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antarorganisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Fragmentasi yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, memperpanjang rantai birokrasi, dan menghambat koordinasi. Sebaliknya, pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang efektif akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting berhasil menyederhanakan struktur birokrasi pelaporan status gizi balita. Sebelum adanya aplikasi, proses pelaporan dilakukan secara manual dan berjenjang sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Setelah implementasi Lapor Klunting, data hasil penimbangan dapat langsung diterima oleh Puskesmas dan diverifikasi sebelum diteruskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Mekanisme tersebut mempercepat proses pelaporan sekaligus mempermudah koordinasi antarinstansi.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Endah Mumpuni, yang menjelaskan:

"Melalui Lapor Klunting, data dari Posyandu dapat langsung diterima oleh Puskesmas untuk diverifikasi, kemudian diteruskan ke Dinas Kesehatan. Dengan sistem ini, proses pelaporan menjadi lebih cepat dan memudahkan kami dalam memantau perkembangan status gizi balita di setiap wilayah."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Lapor Klunting telah mengurangi fragmentasi birokrasi melalui pembagian tugas yang jelas antara kader Posyandu, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan. Kader bertanggung jawab melakukan pengukuran dan penginputan data, Puskesmas melaksanakan verifikasi dan pengendalian mutu data, sedangkan Dinas Kesehatan memanfaatkan data tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan dan evaluasi program. Dengan demikian, setiap tingkatan organisasi memiliki fungsi yang saling melengkapi tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan.

Gambar 8 mendeskripsikan bahwa struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas Sidoarjo yang menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting didukung oleh pembagian tugas dan kewenangan yang jelas pada setiap unit organisasi. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Kepala Puskesmas bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sedangkan pelaksanaan program gizi berada pada koordinasi unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membawahi penanggung jawab program gizi, nutrisisonis, bidan penanggung jawab wilayah, serta kader Posyandu sebagai pelaksana di tingkat lapangan. Setiap unsur memiliki fungsi yang saling melengkapi, mulai dari pelaksanaan penimbangan dan pengukuran balita, penginputan data ke dalam aplikasi Lapor Klunting, verifikasi data oleh petugas gizi, hingga pelaporan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kejelasan struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Lapor Klunting telah menerapkan mekanisme koordinasi yang terintegrasi dan pembagian kewenangan yang sistematis. Adanya pembagian tugas sesuai dengan fungsi masing-masing mampu meminimalkan tumpang tindih kewenangan, mempercepat alur pelaporan, serta meningkatkan efektivitas koordinasi antarpelaksana. Dengan demikian, struktur organisasi Puskesmas Sidoarjo menjadi bukti bahwa indikator fragmentasi dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting telah berjalan dengan baik, karena setiap pelaksana memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya dalam mendukung deteksi dini status gizi balita dan percepatan penanganan stunting.



Gambar 8. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas Sidoarjo
Sumber: Data Primer, 2026

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nusantara et al. (2023) yang menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor dan pembagian tugas yang jelas mampu meningkatkan efektivitas implementasi program pencegahan stunting. Hasil penelitian ini juga didukung oleh UNICEF (2023) yang menegaskan bahwa sistem rujukan dan koordinasi antarlevel pelayanan kesehatan merupakan faktor penting dalam mempercepat penanganan balita berisiko stunting. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator fragmentasi dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting telah berjalan dengan baik. Pembagian tugas yang jelas, jalur koordinasi yang sederhana, serta mekanisme verifikasi data mampu mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat proses pelaporan. Temuan ini memperkuat teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa struktur birokrasi yang sederhana dan koordinatif akan meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan karena setiap pelaksana memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

Implementasi *e-government* melalui aplikasi Laporan Klunting dalam upaya menurunkan angka stunting di Posyandu Kelurahan Magersari telah berjalan dengan baik berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, informasi mengenai penggunaan aplikasi disampaikan secara berjenjang melalui sosialisasi, bimbingan teknis, petunjuk teknis, dan koordinasi rutin sehingga tujuan serta mekanisme pelaporan digital dipahami oleh para pelaksana. Dari aspek sumber daya, implementasi didukung oleh ketersediaan kader Posyandu, tenaga kesehatan, pembagian tugas yang jelas melalui Surat Keputusan Tim Inovasi Laporan Klunting, serta dukungan sarana teknologi berupa *smartphone*, jaringan internet, Google Spreadsheet, dan alat antropometri. Pada aspek disposisi, kader Posyandu, bidan, dan petugas gizi menunjukkan sikap menerima, mendukung, dan berkomitmen dalam menggunakan aplikasi meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, implementasi telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), mekanisme verifikasi data, dan koordinasi lintas kelembagaan yang mendukung pelaporan status gizi balita secara lebih cepat, akurat, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, seperti masih adanya pencatatan manual di beberapa Posyandu, keterbatasan kualitas jaringan internet, serta perlunya peningkatan kapasitas digital kader dan standardisasi alat antropometri agar implementasi aplikasi dapat berlangsung lebih optimal.

Novelty penelitian ini terletak pada ditemukannya melalui aplikasi Laporan Klunting yang mengintegrasikan kader Posyandu, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan dalam satu alur pelaporan digital menggunakan Google Spreadsheet secara real time. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada koordinasi program stunting atau sistem informasi kesehatan secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *e-government* di tingkat Posyandu tidak hanya dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan Edward III, tetapi juga oleh integrasi pelaporan digital berbasis komunitas yang memungkinkan deteksi dini stunting, percepatan pengambilan keputusan, dan penguatan

koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Model ini menjadi kontribusi konseptual sekaligus praktis dalam pengembangan implementasi *e-government* pada pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput..

IV. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *E-Government* melalui aplikasi Lapori Klunting dalam mendukung deteksi dini status gizi balita di Posyandu Kelurahan Magersari telah berjalan cukup baik berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Pada aspek komunikasi, implementasi telah berjalan dengan baik melalui sosialisasi, bimbingan teknis, petunjuk teknis, dan koordinasi yang mendukung pemahaman pelaksana, meskipun pelaporan secara *real time* belum sepenuhnya terlaksana karena sebagian kader masih melakukan pencatatan secara manual. Pada aspek sumber daya, implementasi didukung oleh ketersediaan tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta sarana pendukung seperti Google Spreadsheet, jaringan internet, dan alat antropometri, namun masih diperlukan peningkatan kompetensi digital kader, pemerataan sarana pendukung, dan standarisasi alat antropometri. Pada aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen, sikap positif, dan dukungan terhadap penggunaan aplikasi, meskipun pemberian insentif kepada kader masih relatif terbatas dibandingkan dengan beban kerja yang meningkat akibat digitalisasi pelaporan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, implementasi telah didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP), pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme koordinasi dan verifikasi data yang terstruktur sehingga proses pelaporan menjadi lebih efektif. Aplikasi Lapori Klunting mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan integrasi pelaporan status gizi balita sehingga mendukung deteksi dini balita berisiko gizi buruk dan stunting. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas digital kader secara berkelanjutan, penguatan infrastruktur teknologi, penyempurnaan fitur aplikasi, serta optimalisasi pelaporan secara *real time* agar implementasi *E-Government* melalui Lapori Klunting semakin efektif dalam mendukung percepatan pencegahan dan penurunan stunting.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Puskesmas Sidoarjo, Kelurahan Magersari, seluruh kader Posyandu Kelurahan Magersari, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan izin, dukungan, data, informasi, dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan yang telah berpartisipasi dalam proses wawancara sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Apresiasi yang sebesar-besarnya diberikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- [1] A. A. G. Agung Yana, I. N. Y. Astana, and M. Yuneta, "Peranan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Pengawasan dalam Implementasi Sistem E-Procurement di Kota Kupang," *J. Spektran*, vol. 10, no. 1, p. 1, 2022, doi: 10.24843/spektran.2022.v10.i01.p01.
- [2] Perdian Muhammad Thoha, Rizki Puja Kurniawan, and Andhita Risiko Faristiana, "Perubahan Komunikasi Orang Tua Terhadap Anak Di Era Digital," *Student Sci. Creat. J.*, vol. 1, no. 4, pp. 415–431, 2023, doi: 10.55606/sscj-amik.v1i4.1682.
- [3] T. P. H. Atomoko, "Peningkatan Higiene Sanitasi Sebagai Upaya Menjaga Kualitas Makanan dan Kepuasan Pelanggan di Rumah Makan Dhamar Palembang," *J. Khasanah Ilmu*, vol. 8, no. 1, pp. 1–9, 2017.
- [4] R. Rusmana and I. Sari, "Implementasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik Guna Menunjang Efektivitas Rekam Medis Elektronik di UPTD Puskesmas Campaka," *J-REMI J. Rekam Med. dan Inf. Kesehat.*, vol. 4, pp. 203–212, Aug. 2023, doi: 10.25047/j-remi.v4i4.3956.
- [5] Erly pangestuti, Maisa, R. sari Dewi, and Yuli Indarsih, "Penyelesaian Dan Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua," *Maleo Law J.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–9, 2023, doi: 10.56338/mlj.v7i1.3422.
- [6] N. F. Ruhyana, E. Nurfindarti, and W. Y. Essa, "Studi Prioritas Lokus Penanganan Stunting Kabupaten Sumedang dengan Pendekatan Kajian Resiko Adaptasi Perubahan Iklim," *J. Borneo Adm.*, vol. 17, no. 1, pp. 65–88, 2021, doi: 10.24258/jba.v17i1.768.
- [7] A. Rohalia and H. Sukmana, "Efektivitas Program Posyandu Cempaka dalam Penurunan Stunting di Desa Tambak Kalisogo," *J. Publicuho*, vol. 7, no. 3, pp. 1427–1442, 2024, doi: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/501>.

- [8] S. Syafrawati *et al.*, “Factors driving and inhibiting stunting reduction acceleration programs at district level: A qualitative study in West Sumatra,” *PLoS One*, vol. 18, no. 3 MARCH, pp. 1–21, 2023, doi: 10.1371/journal.pone.0283739.
- [9] I. B. Astawa, I. A. S. Widnyani, and I. D. U. Dewi, “Implementasi Kebijakan Posyandu untuk Meningkatkan Partisipasi Ibu dan Balita di Kecamatan Kuta,” *Akad. J. Mhs. Humanis*, vol. 5, no. 3, pp. 1382–1393, 2025, doi: 10.37481/jmh.v5i3.1599.
- [10] R. Khoirunnisa and N. Nurchayati, “Kesejahteraan Subjektif pada Lanjut Usia Terlantar,” *J. Psikol. Teor. dan Terap.*, vol. 14, no. 1, pp. 124–140, 2023, doi: 10.26740/jptt.v14n1.p124-140.
- [11] A. Hartiningtyas and I. U. Choiriyah, “Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo,” *J. Publicuho*, vol. 7, no. 3, pp. 1558–1573, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.517>
- [12] S. Suwardi, “The Strategy of Corona Virus Disease Pandemic-Post Education Service Policy at Primary Education Level in Salatiga, Central Java Province, Indonesia,” *Ra J. Appl. Res.*, vol. 09, no. 05, pp. 244–253, 2023, doi: 10.47191/rajar/v9i5.02.
- [13] Y. Amrozi, N. Aini, and Z. Munadhiroh, “Peta Perkembangan E-Government di Indonesia,” *JSI J. Sist. Inf.*, vol. 14, no. 1, pp. 2465–2472, 2022, doi: 10.18495/jsi.v14i1.16635.
- [14] J. W. Creswell, *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010.
- [15] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*, Third edit. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.